

JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI

SERI HUMANIORA

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2012

Daftar Isi

Analisa <i>Directness Level</i> Penyampaian Keluhan dan Saran pada Kolom Opini Surat Kabar Melati	01 - 08
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD Yuliusman	09 - 18
Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru terhadap Kinerja Individu Nela Safelia, Susfayetti dan Rita Friyani	19 - 24
Model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Suandi, Yusma Damayanti dan Yulismi	25 - 34
Impor <i>New Process Scraps and Wastes of Natural Latex Condoms</i> Ditinjau dari Perspektif <i>Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal</i> Rahayu Repindowaty Harahap	35 - 46
Fungsi Pemerintahan dalam rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty	47 - 56
Pengembangan Pendekatan Kontekstual terhadap Hasil Belajar Renang Gaya Dada Muhammad Ali	57 - 68
Pengaruh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Citra Penyelenggara Layanan Publik Erida, Ade Octavia dan Yenny Yuniarti	69 - 76
Pedoman Penulisan	

FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty

*Fakultas Hukum Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstract

This study examines two issues: 1. How to setup the functions of the central and local public services. 2. Is the form of public service tasks be a function of the central government and local. The study was designed studies assessing the normative legal provisions related legislation. the principles of law, legal theory, using several approaches namely conceptual approach, historical approach, and the approach statute the provisions of the Act governing the public service. Legal materials used are of primary legal materials and secondary legal materials. Against primary and secondary legal materials, the analysis used in this study interpretation. The result are: formally adopted "division of powers", there are vertical division of authority of the Central Government and Local Government. It is contained in Article 1 paragraph (1) in conjunction with Article 18 and 18A of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, a delegate to the attribution of the 1945 Act to regulate it. Act 32 of 2004, Government Regulation Number 38 of 2007 and Act 25 of 2009, shared tasks and formal patterns formal autonomous systems. His form for the area - the area to control and manage public services in the household. So the forms of public service tasks of the central and local governments, autonomous system formal approach.

Key words: The division of tasks formal pattern, formal autonomy, public service, formal autonomy

PENDAHULUAN

Berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, para ilmuwan mengemukakan pendapat diantaranya, (Tatiek Sri Djatmiati, 2004:9) mengemukakan pengertian fungsi dalam arti Normatif, dalam Disertasinya yang berjudul "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", adalah: "Dalam artian ini fungsi adalah "tugas" yang berkaitan dengan jabatan publik." Pengertian ini menunjukkan pada tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat publik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Pada saat sekarang, menurut pendapat (Haiyanta dkk, 1997:10) paling tidak pemerintah harus menjalankan tiga fungsi yaitu: "fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan."

Dari pendapat tersebut di atas menunjukan tugas-tugas pemerintah yang harus dijalankan atau dilaksanakan paling sedikit tiga fungsi, yaitu: fungsi pengaturan, fungsi

pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Tugas-tugas pemerintahan dalam arti yang luas tersirat dalam pembukaan UUD 1945, menyatakan,..."kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Dari alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut diatas, terlihat prinsip tujuan membentuk suatu pemerintahan dalam Negara Indonesia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik yaitu diantaranya:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia ;
- b. Seluruh tumpah darah Indonesia ;
- c. Memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya (Philipus M. Hadjon) mengemukakan "Karena UUD 1945 tidak merincikan secara tegas tentang pelaksanaan asas desentralisasi dan system otonomi, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan republik Indonesia terdapat variasi pelaksanaan asas desentralisasi dan sistem otonomi daerah."

Pendapat tersebut dapat dilogikakan, UUD 1945 hanya mengatur ketentuan-ketentuan dasar saja, tentang kekuasaan negara di Indonesia dan tidak merincikan secara tegas tentang penerapan asas desentralisasi dan sistem otonomi daerah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, jika dibandingkan dengan sistem federasi kewenangan pemerintah pusat federasi dirinci di dalam Konstitusinya. Sedangkan sisa menjadi kewenangan negara-negara bagian (*residual power*). Pendapat tersebut juga menggambarkan berbagai UU yang dibentuk mengatur desentralisasi, dalam pelaksanaannya selalu berubah-ubah di negara Indonesia. Hal ini diketahui, sebagaimana yang dikemukakan (Philipus M. Hadjon):

Dari awal Republik ini secara berturut-turut berbagai Undang-undang yang mengatur pelaksanaan desentralisasi adalah UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 tahun 1948, UU No. 1 tahun 1957, Pen. Pres No. 6 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1965, UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan saat ini lahir UU No. 32 tahun 2004.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sumber hukum dari UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang berhubungan dengan pelayanan publik. Apakah UU yang dibentuk ada mengatur tentang tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelayanan publik, terutama UU NO.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berkaitan yang telah dikemukakan tersebut di atas, masalah yang akan diteliti dan setelah itu akan dilanjutkan dengan suatu pengkajian, baik dari segi hukum, asas-asas, prinsip hukum, dan teori-teori hukum, khususnya teori pembagian kewenangan, dalam kaitan pembagian tugas-tugas pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Karakter Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif objek kajian sesuai dengan

permasalahan yang diteliti yang merupakan isu hukum utama, menitikberatkan penelitian norma-norma hukum, seperti pengaturan fungsi pemerintahan maupun teori-teori hukum (fungsi) pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), konseptual (*conceptual Approach*) dan pendekatan historis.

Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum utama (primer) dalam penelitian ini berasal dari UUD 1945, UU tentang pemerintah daerah, yang ada kaitan dengan penulisan ini, disamping itu Undang-undang tentang pelayanan publik, UU yang dimaksud sebagaimana telah dikemukakan pada lembaran terdahulu. Sedangkan peraturan lainnya dijadikan sebagai pembantu, digunakan dalam rangka untuk mempertajam analisis yang ada kaitan dengan substansi rumusan masalah tersebut dimuka.
- b. Bahan hukum (Sekunder) yang berupa buku-buku, berbagai karya serta hasil penelitian, kamus-kamus hukum yang ada hubungannya dengan substansi, pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prosedur Pengumpulan bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan tersebut di atas, dikumpulkan Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan secara kritis, logis dan sistematis, dikumpulkan dengan sistem kartu (*card system*), hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan hukum tersebut, dengan demikian bahan hukum akan disusun dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi kemudian dianalisis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

analisis interpretasi yaitu hukum diidentifikasi untuk dapat mengetahui dan menjelaskan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka pelayanan publik

PEMBAHASAN

Pengaturan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pada BAB I Pendahuluan telah dikemukakan yang berkaitan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah, pengertian fungsi dalam arti “Normatif”, diartikan “tugas”, yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Dalam

penelitian yang dibahas hanya fungsi pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dalam pelayanan publik yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan “pengaturan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan publik menurut ketentuan-ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 setelah dilakukan suatu pengkajian terhadap ketentuan Pasal-Pasalnya ditemukan ada suatu perincian mengenai batas-batas pengaturan tugas pemerintah pusat dan daerah, walaupun rumusannya masih menggambarkan secara umum (karakter norma hukumnya bersifat umum), hal itu dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya, yang berisikan batas-batas pengaturan tugas pemerintahan dimaksud, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.

Dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dimaksud walaupun belum ada suatu perincian dari tugas pemerintahan

Tabel 1. Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pelayanan Publik (Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004)

No	Dasar Pengaturan	Perincian Tugas
1	Pasal 10 ayat (1) jo	Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Urusan pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan Fiskal Nasional Agama
	Pasal 10 ayat (3)	Tugas pemerintah di luar ayat (3), pemerintah dapat : Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan
	Pasal 10 ayat (5)	Melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan

baik kewenangan pemerintah pusat dan daerah secara tidak langsung telah menetapkan dan menunjukan batas-batas pengaturan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pelayanan publik. Kemudian pengaturan dari kewenangan pemerintah pusat dimaksud dirumuskan dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) nya hal itu telah dirincikan dalam tabel tersebut di atas. Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas merupakan kewenangan yang mutlak dari pemerintah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan : “Yang dimaksud urusan pemerintahan dalam ayat ini adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lain yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas jelaslah yang dimaksud dengan tugas yang mutlak dari pemerintah pusat yang dimaksud menunjukan kepada ayat (3) nya yaitu tugas :

1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama

Tugas pemerintah yang diatur dalam Pasal 10 ayat (5) dimaksud yang diuraikan dalam tabel tersebut di atas, menunjukan kepada kewenangan dalam tugas-tugas atau urusan-urusan pembantuan dimana pemerintah pusat dapat melimpahkan atau menugaskan kepada pejabat-pejabat di daerah sebagai wakil pemerintah baik kepada Gubernur sampai kepada pemerintah desa. Berkaitan dengan tugas yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (5)

Tabel 2. Tugas Pemerintah Provinsi Dalam Bidang Pelayanan Publik (Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004)

No	Dasar Pengaturan	Perincian Tugas
1	Pasal 13 ayat (1) Kewenangan Wajib	Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/ Kota Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas Kabupaten/ Kota Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/ Kota Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten. Kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
2.	Pasal 13 ayat (2) Kewenangan Pilihan	Meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Tabel 3. Tugas Pemerintah Kabupaten dan Kota Dalam Bidang Pelayanan Publik (Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004)

No	Dasar Pengaturan	Perincian Tugas
1	Pasal 14 ayat (1) Kewenangan Wajib	Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bidang ketenagakerjaan Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pelayanan administrasi penanaman modal Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
2	Pasal 14 ayat (2) Kewenangan Pilihan	Kewenangan bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan : yang dimaksud dengan diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah diluar ayat (3) sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal 10 ayat (5) tersebut jelaslah tugas pemerintah tersebut di luar dari ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan tidak ada suatu perinciannya dalam UU ini yang mengatur secara langsung dalam bidang pelayanan publik. Selanjutnya kewenangan dari daerah provinsi dan daerah Kabupaten dan Daerah Kota dirumuskan dalam ketentuan Pasal-pasal berikutnya berkaitan dengan hal itu dapat dilihat pada tabel-tebel di halaman berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat UU No. 32 Tahun 2004 ketentuan Pasal-Pasalnya memuat perincian, batas-batas pengaturan tugas pemerintah pusat dan daerah ada beberapa ketentuan yang memuat berkaitan pelayanan publik seperti dalam bidang :

1. Penyediaan sarana dan prasarana umum
2. Penanganan bidang kesehatan

3. Penyelenggara Pendidikan
4. Penanggulangan masalah social
5. Pelayanan bidang tenagakerjaan
6. Pelayanan pertanahan
7. Pelayanan adminstrasi penanaman modal
8. Penyelenggaraan Pelayanan dasar lainnya.

Menanggapi ketentuan UU No.32 Tahun 2004 memuat dan mengatur perincian batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang dimaksud, ketentuan norma, masih bersifat umum, berkaitan dengan hal itu, dirinci lagi dengan jelas, supaya untuk mencegah tumpah tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten dan Kota dalam rangka pelayanan publik.

Seterusnya pada tanggal 9 Juli 2007 Presiden R.I mengeluarkan PP No. 38 Tahun 2007, sebagai pelaksana UU No.32 Tahun 2004, mencantumkan kewenangan pemerintahan pada Pasal 2 ayat (4), dengan menggunakan istilah “urusan pemerintahan. Urusan dalam bidang pelayanan publik yang dirumuskan ketentuan pasal dimaksud di atas meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Perumahan
4. Pertanahan
5. Kependudukan dan catatan sipil
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
8. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
9. Penanaman modal
10. Kebudayaan dan Pariwisata
11. Kepemudaan dan olahraga
12. Perpustakaan
13. Komunikasi dan Informasi
14. Pertanian dan Ketahanan Pangan
15. Perdagangan
16. Perindustrian

Dari 21 urusan pemerintahan tersebut di atas, jika diperas intinya yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung meliputi:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Perumahan
4. Pertahanan
5. Kependudukan dan catatan sipil
6. Keluarga berencana
7. Perpustakaan
8. Pertanian
9. Perdagangan

Urusan-urusan tersebut diatas, tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, baik dalam penetapan kebijakan, operasional, koordinasi, perencanaan, pengembangan, sosialisasi, penetapan pedoman, pemberian izin, dan sebagainya, berdasarkan kewenangan tingkatan pemerintahan.

Pengaturan Pembagian Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009

Di dalam UU No.25 Tahun 2009 pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dirumuskan dalam bab III, yang berjudul yaitu Pembina, organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik. Pada bagian kesatu, diberi judul: "Pembina dan penanggung jawab pelayanan publik." Dalam pasal b dirumuskan sebagai berikut:

1. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab.
2. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
4. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Menteri.
6. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur.

Dari ketentuan pasal b ayat (1), terlihat ada Pembina dan penanggung jawab dalam rangka untuk menjamin pelayanan publik. Yang di tunjuk sebagai Pembina, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal b ayat (2) yaitu:

1. Pimpinan lembaga negara
2. Kementerian Negara
3. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
4. Pimpinan lembaga komisi negara
5. Gubernur di tingkat Provinsi
6. Bupati di tingkat Kabupaten
7. Walikota di tingkat kota.

Tugas-tugas Pembina tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) yaitu:

1. Melakukan pembinaan
2. Pengawasan
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penangung jawab.

Disamping hal tersebut di atas Pembina mempunyai tugas diwajibkan melaporkan hasil dari perkembangan kinerjanya pelayanan publik kepada Presiden dan DPR. Begitu juga Gubernur, Bupati/Walikota, wajib melaporkan perkembangan pelayanan publik kepada DPRD masing-masing, disamping itu gubernur melapor kepada Menteri dan Bupati kepada Gubernur.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui ada pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik. Di tingkat pusat, pimpinan lembaga negara, kementerian negara, pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, dan pimpinan lembaga komisi negara, sedangkan di tingkat provinsi Gubernur, di tingkat Kabupaten Bupati, pada tingkat kota walikota.

Bentuk Tugas - Tugas Pelayanan Publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Pada lembar terdahulu telah dikemukakan istilah yang digunakan dalam UU No.32 Tahun 2004, menggunakan istilah urusan wajib dan pilihan, urusan-urusan dalam bidang pelayanan publik, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2004 tersebut di atas yaitu:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Perumahan
4. Pertahanan
5. Kependudukan dan catatan sipil
6. Keluarga berencana
7. Perpustakaan
8. Pertanian
9. Perdagangan

Seterusnya, bentuk-bentuk urusa-urusan yang di atur dalam PP no. 38 Tahun 2007, sebagaimana yang telah dikemukakan pada lembar terdahulu yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan
4. Pertanian
5. Kependudukan dan catatan sipil
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
8. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
9. Penanaman modal
10. 10.Kebudayaan dan Pariwisata
11. 11.Kepemudaan dan olahraga
12. 12.Perpustakaan
13. 13.Komunikasi dan Informasi
14. 14.Pertanian dan Ketahanan Pangan
15. 15.Perdagangan
16. 16.Perindustrian

Kemudian di dalam UU No.25 Tahun 2009, bentuk-bentuk urusan-urusan dalam bidang Pelayanan Publik yang dirumuskan dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Bentuk-bentuk urusan-urusan dalam bidang pelayanan publik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut di atas meliputi:

1. Pendidikan
2. Pengajaran
3. Pekerjaan dan usaha
4. Tempat tinggal
5. Komunikasi dan informasi
6. Lingkungan hidup
7. Kesehatan
8. Jaminan sosial
9. Energi
10. Perbankan
11. Perhubungan
12. Sumber daya alam
13. Pariwisata
14. Dan lain- lainnya.

Sedangkan ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 (ayat 1) tersebut di atas meliputi:

1. Pelayanan barang publik
2. Jasa publik

3. Pelayanan administrasi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk pelayanan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif, terlihat dalam ketentuan Pasal 5 tersebut di atas. Selanjutnya, menanggapi pengaturan bentuk-bentuk urusan-urusan pelayanan publik, yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007 dan UU No.25 Tahun 2009, telah mendekati dari ajaran sistem otonomi formil, yaitu mengandung suatu pengertian tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dapat pula dilakukan pemerintah daerah. Di samping itu memuat pula ajaran sistem otonomi materil, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang diperincikan dengan tegas dalam UU Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis melalui pengkajian dalam bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pelayanan Publik memuat Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pelayanan publik menurut UU No.32 Tahun 2004, setelah melakukan pengkajian melalui penelitian ketentuan pasal-pasal yang ditemukan ada suatu perincian mengenai batas-batas pengaturan tugas pemerintah pusat dan daerah, baik Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Kota, begitu juga PP No.38 Tahun 2007, rumusan norma masih menggambarkan secara umum (karakter norma hukumnya bersifat umum) begitu juga UU No.25 Tahun 2009, karakter normanya masih bersifat umum. Perincian pembagian tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengertian pembagian dalam pelaksanaannya urusan-

urusan pelayanan publik, diserahkan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tugas pelayanan publik tersebut pada intinya tugas Pemerintah Pusat dalam kerangka negara Kesatuan dalam sistem otonomi dan desentralisasi yang menganut pembagian kewenangan pola formal dan sistem otonomi formil dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bentuk Tugas - Tugas Pelayanan Publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan bentuk-bentuk tugas pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, setelah melakukan pengkajian melalui penelitian ketentuan pasal-pasal yang ditemukan ada bentuk-bentuk tugas pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, PP No.38 Tahun 2007, mengatur juga tugas-tugas dimaksud, begitu juga UU No.25 Tahun 2009, rumusan normanya masih bersifat umum dengan perkataan lain karakter norma hukumnya masih bersifat umum, hal ini mengandung suatu pengertian tidak ada perbedaan sifat antara tugas-tugas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Prinsipnya apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dapat pula dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Saran

Sejalan dengan prinsipnya tugas utama UUD 1945 untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, untuk mengatur wewenang pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 A UUD 1945, mengingat karakter norma hukum yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, demikian pula UU No.25 Tahun 2009, Norma hukum bersifat umum, agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dirumuskan kembali batas-batas tugas dari pemerintah yang dimaksud dengan jelas dan begitu juga urusan-urusan pelayanan publik, mana yang

menjadi tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota, sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penyempurnaan UU yang dimaksud, dalam rangka pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djatmiami, Tatiek Sri. 2004. Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarja Universitas Airlangga, Surabaya.
- Haiyanta. 1997. Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara), Makalah.

Daftar Aturan Hukum

UUD

1. UUD RI Tahun 1945 (Tgl. 18 Agustus 1945 sampai Tgl. 27 Desember 1949), Berita RI Th. II/7.
2. UUD Negara RI Th. 1945 (19 Oktober 1999) jo. Keputusan MPR RI Tgl. 19

Oktober 1999, Keputusan MPR RI Tgl. 18 Agustus 2000, Keputusan MPR RI Tgl. 9 November 2001 dan Keputusan MPR RI Tgl. 11 Agustus 2002, Tentang Perubahan I, II, III dan IV UUD Negara RI Th. 1945.

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Th. 1999 No. 60, TLN RI No. 3839)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Th. 2007 No. 82)

